

Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS-NAHP

Disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan BSPS Tahun
2019

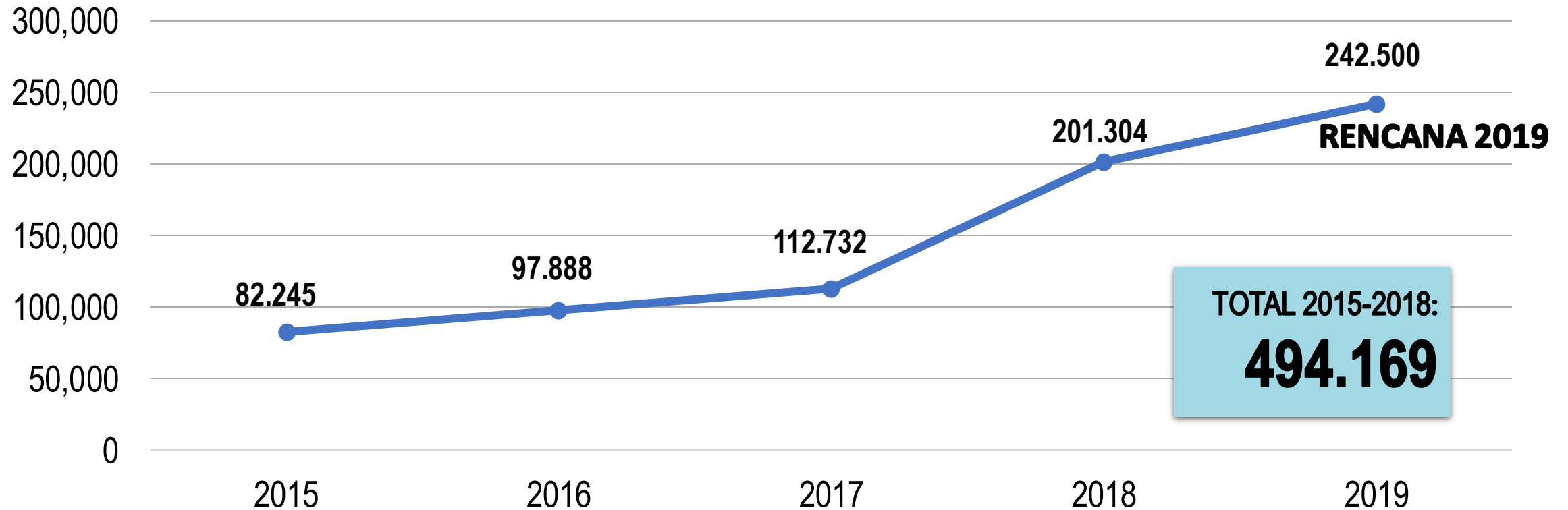
Tangerang, 23 Agustus 2019



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Direktorat Rumah Swadaya



PENYELENGGARAAN BSPS TAHUN 2015-2019



Bentuk	2015	2016	2017	2018	Total 2015-2018	Rencana 2019
Pembangunan Baru (PB)	20.756	1.007	2.000	5.999	29.762	5.483
Peningkatan Kualitas (PK)	61.489	96.881	110.732	195.305	464.407	237.017
Total (unit)	82.245	97.888	112.732	201.304	494.169	242.500

PENYELENGGARAAN BSPS TAHUN 2019

PAGU ANGGARAN

242.500

APBN: 192.500 unit

NAHP : 50.000 unit

PEMBANGUNAN BARU

5.483

PENINGKATAN KUALITAS

237.017

ALOKASI

PB PRS

5.483
Unit

PK PRS

33.708
Unit

PK SNVT

198.395
Unit

- ❑ Kepmen PUPR No. 702/KPTS/M/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Perubahan atas Kepmen PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Besaran Nilai dan Lokasi BSPS TA. 2019;
- ❑ Kepdirjen Penyediaan Perumahan No. 81/KPTS/Dr/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Kepdirjen PNP Nomor 67/KPTS/DR/2019 tentang Perubahan atas Kepdirjen PNP Nomor 45/KPTS/DR/2019 tentang Perubahan Lokasi BSPS TA 2019 untuk Desa/Kelurahan;
- ❑ Surat Dirjen Penyediaan Perumahan No. RU.1002-Dr/926 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Penyampaian Perubahan Alokasi Jumlah Unit BSPS Tahun 2019 di Wilayah Tertentu;
- ❑ Alokasi yang telah diterbitkan sebanyak **237.586** unit, sisa **4.914** unit (stock);

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSEP DAN MEKANISME



PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2019

01

Progres Fisik dan Keuangan Rutin

Dilakukan dengan dukungan aplikasi e-monitoring dan progres mingguan yang dikirimkan oleh PPK Rumah Swadaya

02

Survey Lapangan

Penilaian terhadap ketepatan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya dan penilaian kapasitas *stakeholders* pelaksana.

03

Rapat Evaluasi Program Rumah Swadaya

Dilaksanakan per regional untuk menyampaikan hasil evaluasi Program Rumah Swadaya pada tahun sebelumnya dan memperoleh masukan untuk pengembangan kebijakan Program Rumah Swadaya

04

Focus Group Discussion

Diselenggarakan secara berkala dengan mengundang praktisi bidang perumahan, perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

05

Mid-Term Evaluation

Penyampaian hasil evaluasi tengah periode penyelenggaraan Program Rumah Swadaya

06

Hasil Akhir Pemantauan dan Evaluasi Program Rumah Swadaya Tahun 2019

KRITERIA LOKASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Provinsi dan Kab/Kota dengan tingkat realisasi keuangan dan fisik tinggi, sedang dan rendah

Provinsi dan kab/kota melaksanakan lebih dari 1 (satu) bentuk Program Rumah Swadaya, yaitu BSPS APBN, BSPS NAHP dan DAK Bid. Rumah Swadaya

Hasil evaluasi pelaksanaan Program Rumah Swadaya (BSPS APBN, BSPS NAHP dan DAK Bid. Rumah Swadaya) pada tahun sebelumnya

Aspek penilaian lainnya, seperti terdapat permasalahan yang *urgent* di wilayah, termasuk dalam lokasi tematik (PSN/KSP dan lainnya), lokasi peresmian, lokasi terdampak bencana alam dan lainnya

INSTRUMEN PENDUKUNG PEMANTAUAN DAN EVALUASI



APLIKASI E-MONITORING DAN SIM-BSPS



KUESIONER

1. Penerima bantuan,
2. OPD Bidang Perumahan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota,
3. PPK Rumah Swadaya, SNVT PNP Tingkat Provinsi
4. Tim Teknis
5. Korfes dan fasilitator
6. Bank penyalur
7. Toko bahan bangunan



LAPORAN

1. Rutin mingguan (progres fisik dan keuangan),
2. Rutin bulanan (B01-B12),
3. Berkala (laporan tematik)
4. Tahunan (laporan realisasi dan laporan akhir pelaksanaan Program Rumah Swadaya)

PELAPORAN BSPTS

Alur pelaporan berdasarkan Permen PUPR No. 07 Tahun 2018

DARI	KEPADA	PERIODE	DESKRIPSI
PENERIMA BSPTS	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Rutin, terutama progres 0%, 30% dan 100%	Didampingi TFL
BANK/ POS PENYALUR	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Laporan Bulanan	Melalui Korfes ditembuskan ke Dinas
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Laporan Bulanan	
KOORDINATOR FASILITATOR	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Laporan Bulanan	Ditembuskan ke Dinas
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KPA/ KEPALA SATKER	Laporan Mingguan melalui aplikasi e-monitoring dan Laporan Evaluasi Bulanan (B01-B12)	
KPA/ KEPALA SATKER	DIREKTUR JENDRAL PENYEDIAAN PERUMAHAN	Laporan Tahunan	Melalui Direktur Rumah Swadaya

MINGGUAN

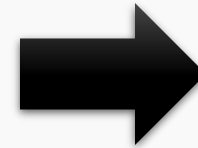
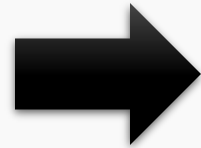
1. Laporan progres keuangan berdasarkan aplikasi e-monitoring
2. Laporan progres fisik dan QS (APBN dan NAHP)

TRIWULAN

**INTERIM
FINANCIAL
REPORT
(IFR)**

TAHUNAN

***ANNUAL
REPORT***



BENTUK PELAPORAN **BSPS** (APBN DAN NAHP)

MINGGUAN

Pelaporan progres keuangan dan fisik melalui aplikasi e-monitoring, SIM-BSPS dan QS



BULANAN

Laporan bulanan (B01-B12)



BERKALA

Laporan Tematik

1. PSN-Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
2. Percepatan Pembangunan Infrast Papua dan Papua Barat melalui Kantor Staf Presiden (KSP)



TAHUNAN

1. Laporan Realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
2. Laporan Akhir Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya



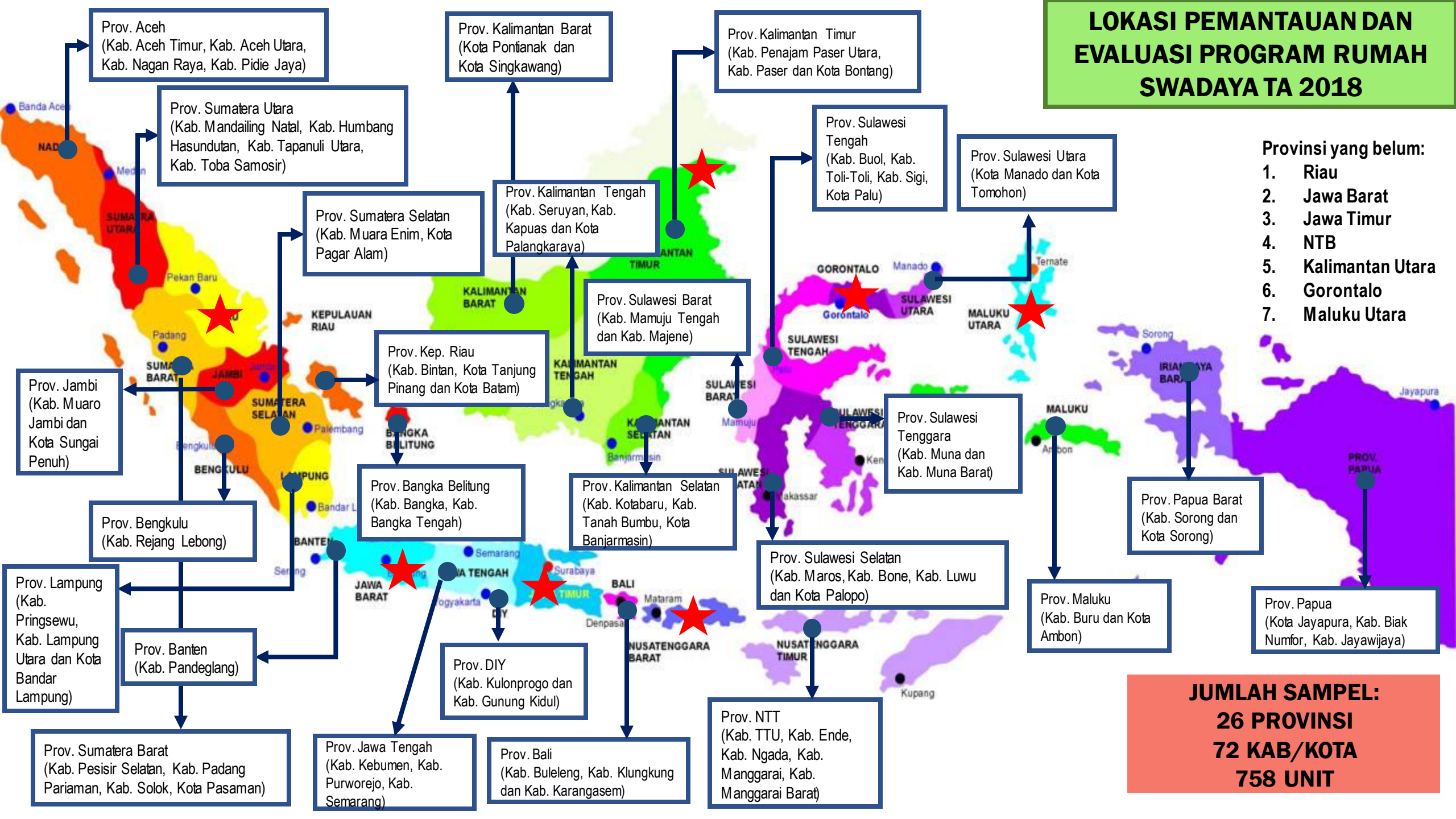
HASIL IDENTIFIKASI OUTPUT KEGIATAN BSPS TA 2018



LOKASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM RUMAH SWADAYA TA 2018

Provinsi yang belum:

1. Riau
2. Jawa Barat
3. Jawa Timur
4. NTB
5. Kalimantan Utara
6. Gorontalo
7. Maluku Utara

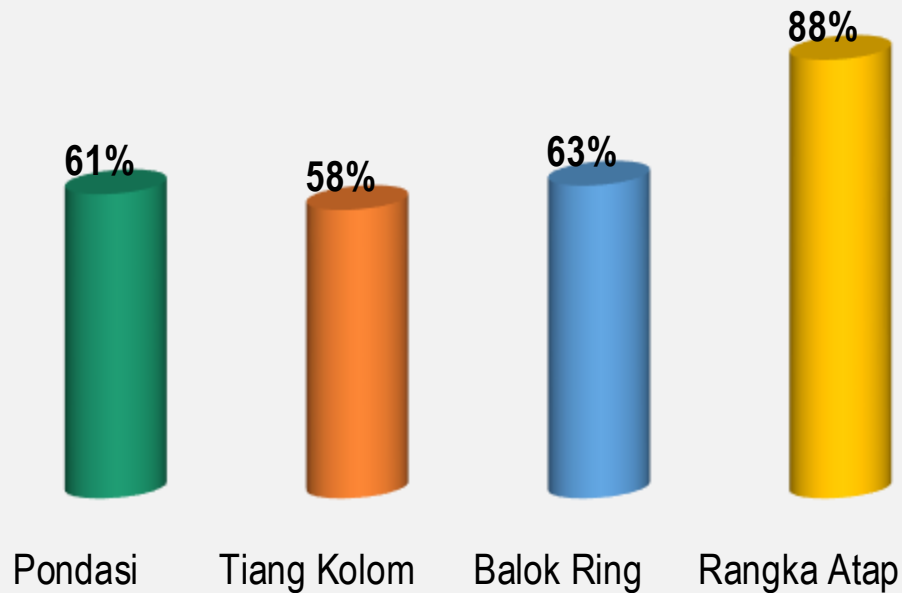


JUMLAH SAMPEL:
26 PROVINSI
72 KAB/KOTA
758 UNIT

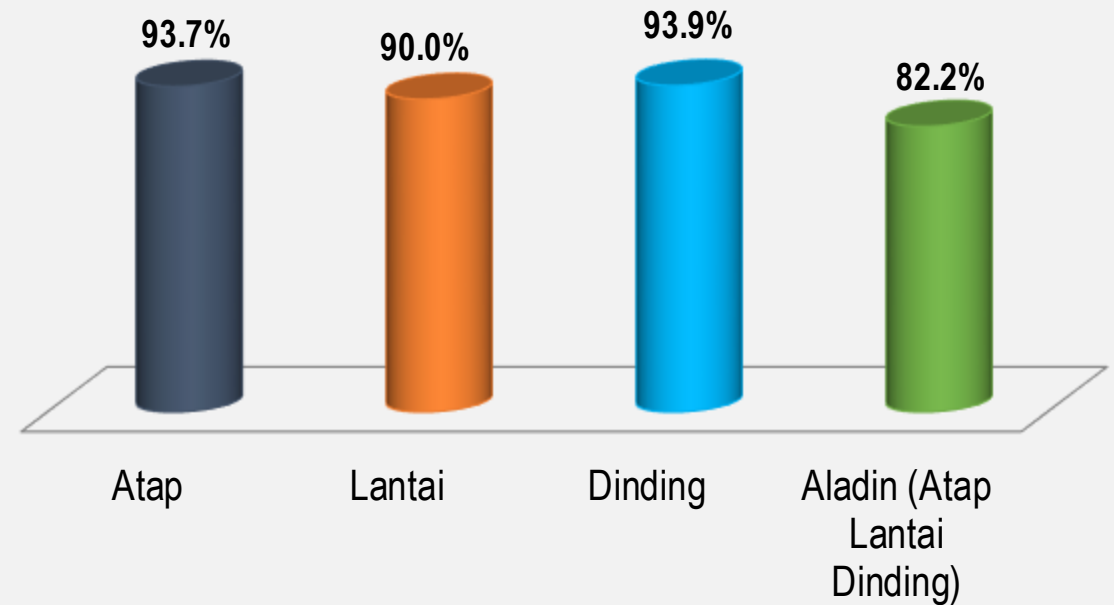
ASPEK KESELAMATAN BANGUNAN

Penerima dana stimulan memanfaatkan dana untuk melakukan peningkatan kualitas komponen struktural dan non-struktural bangunan rumah

Penggantian Komponen Struktural



Penggantian Komponen Non Struktural

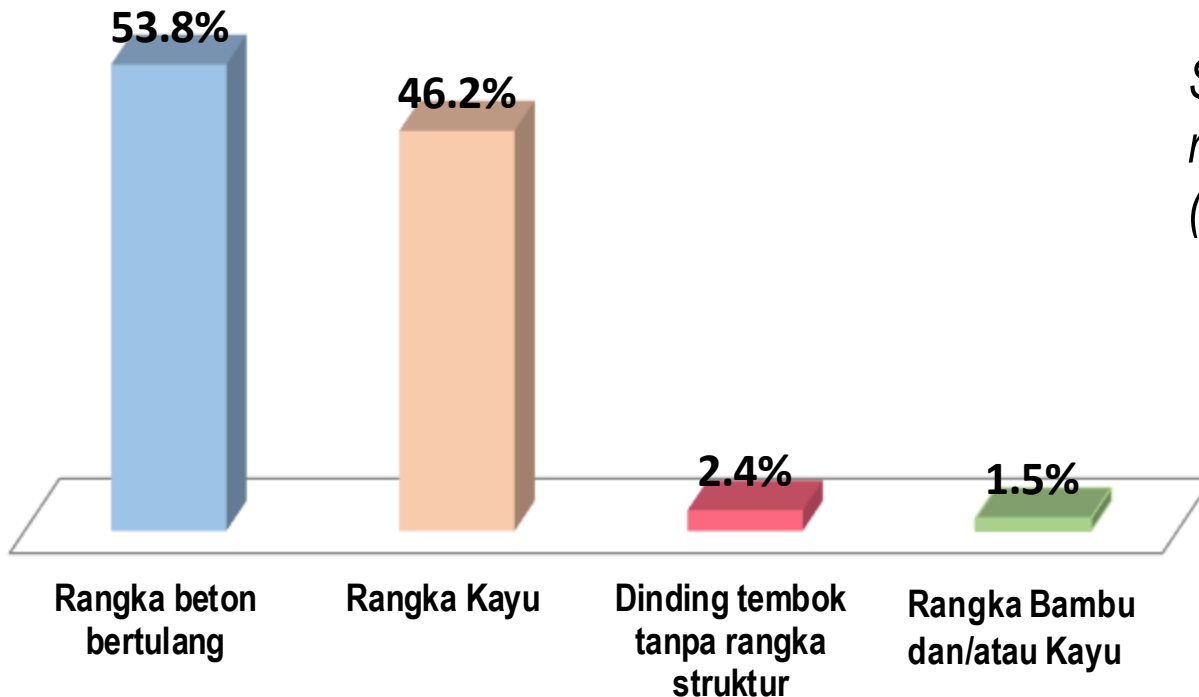


Penerima dana stimulan telah memanfaatkan dana untuk peningkatan kualitas komponen struktural dan non-struktural bangunan rumah. Pemanfaatan dana untuk komponen struktural umumnya untuk rangka atap (88% responden) dan pemanfaatan dana komponen non-struktural adalah untuk bahan atap, lantai dan dinding.

ASPEK KESELAMATAN BANGUNAN

Penerima dana stimulan memanfaatkan dana untuk melakukan peningkatan kualitas komponen struktural dan non-struktural bangunan rumah

Struktur Bangunan Rumah Penerima Bantuan

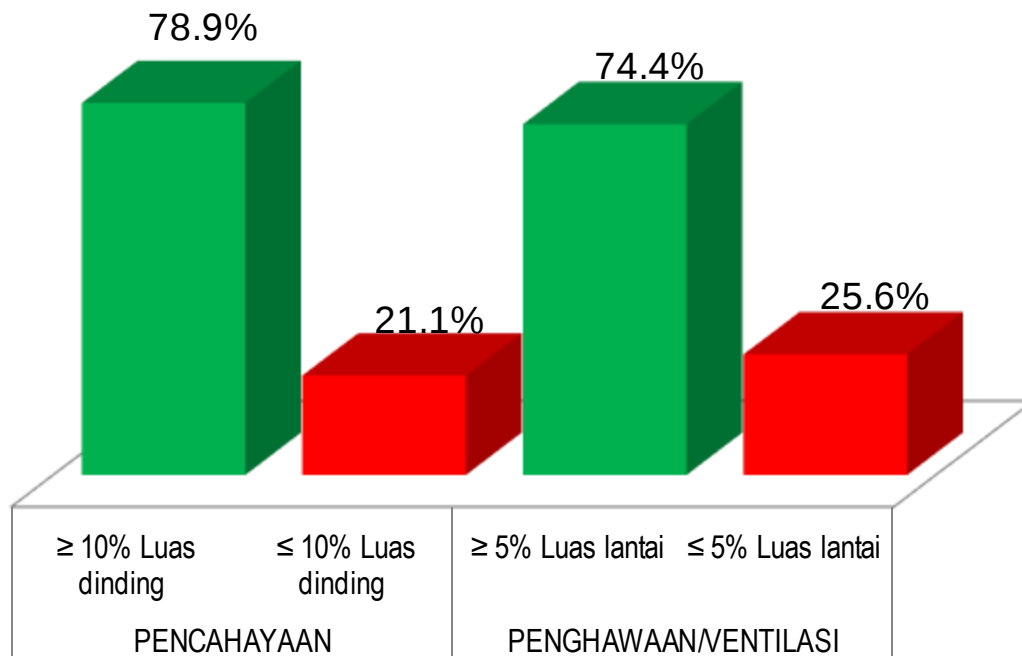


Struktur bangunan penerima stimulan yang menjadi responden umumnya menggunakan rangka beton bertulang (53.8%) dan rangka kayu (46.2%)

ASPEK KESEHATAN PENGHUNI

Penerima dana stimulan memanfaatkan dana untuk meningkatkan aspek pencahayaan, penghawaan dan ketersediaan sistem air bersih dan sanitasi

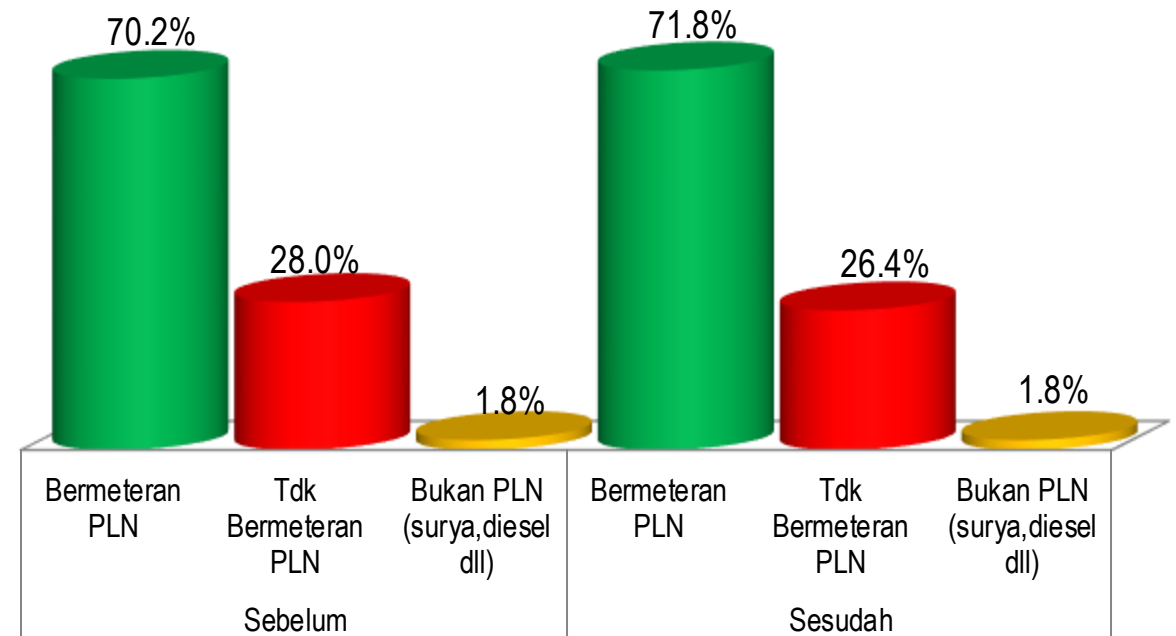
Pencahayaan dan Penghawaan Rumah



Penerima dana stimulan telah memperhatikan aspek pencahayaan dan penghawaan di rumahnya

Sumber: Hasil Pengolahan, 2018

Sumber Penerangan Rumah Penerima Bantuan



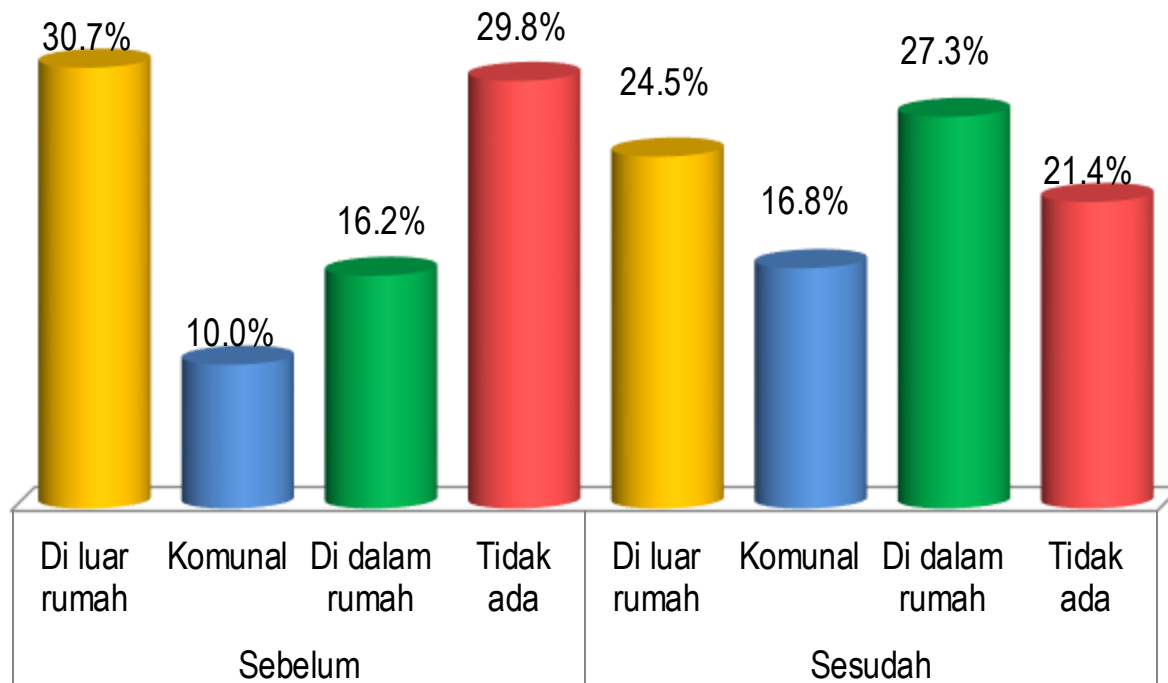
Sebagian besar penerima dana ($\pm 98.2\%$ responden) telah terfasilitasi oleh PLN, baik yang memiliki meteran pribadi, maupun yang masih menumpang pada pemilik rumah terdekat.

ASPEK KESEHATAN PENGHUNI

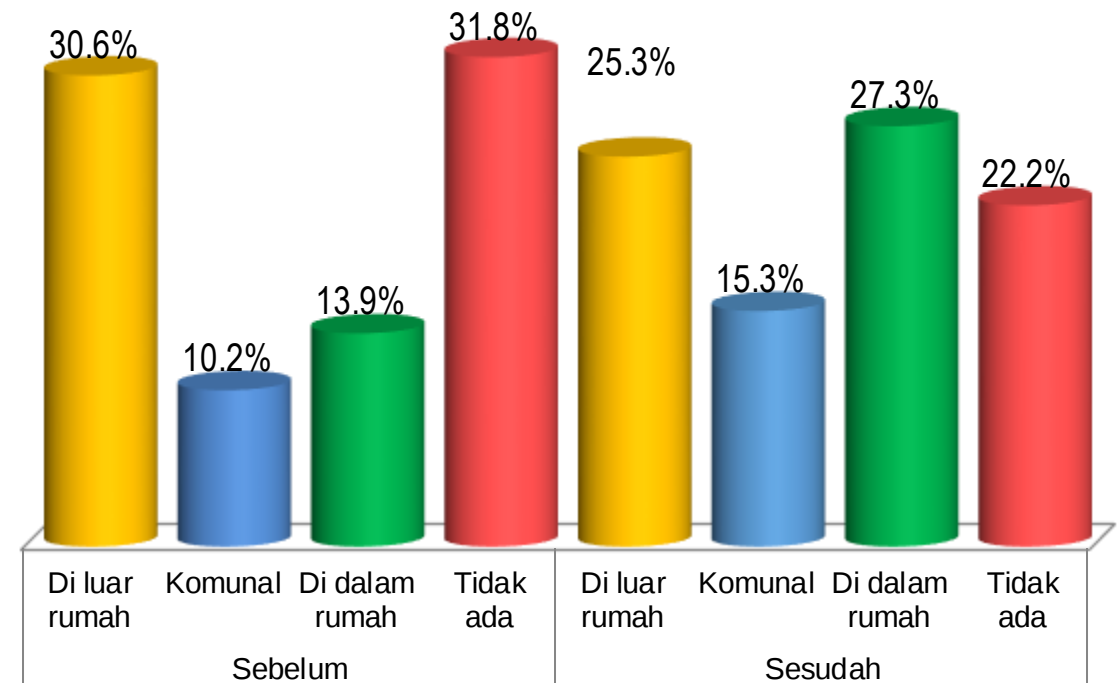
Penerima dana stimulan memanfaatkan dana untuk meningkatkan aspek pencahayaan, penghawaan dan ketersediaan sistem air bersih dan sanitasi

Sumber: Hasil Pengolahan, 2018

Keberadaan Kamar Mandi



Keberadaan Jamban Keluarga

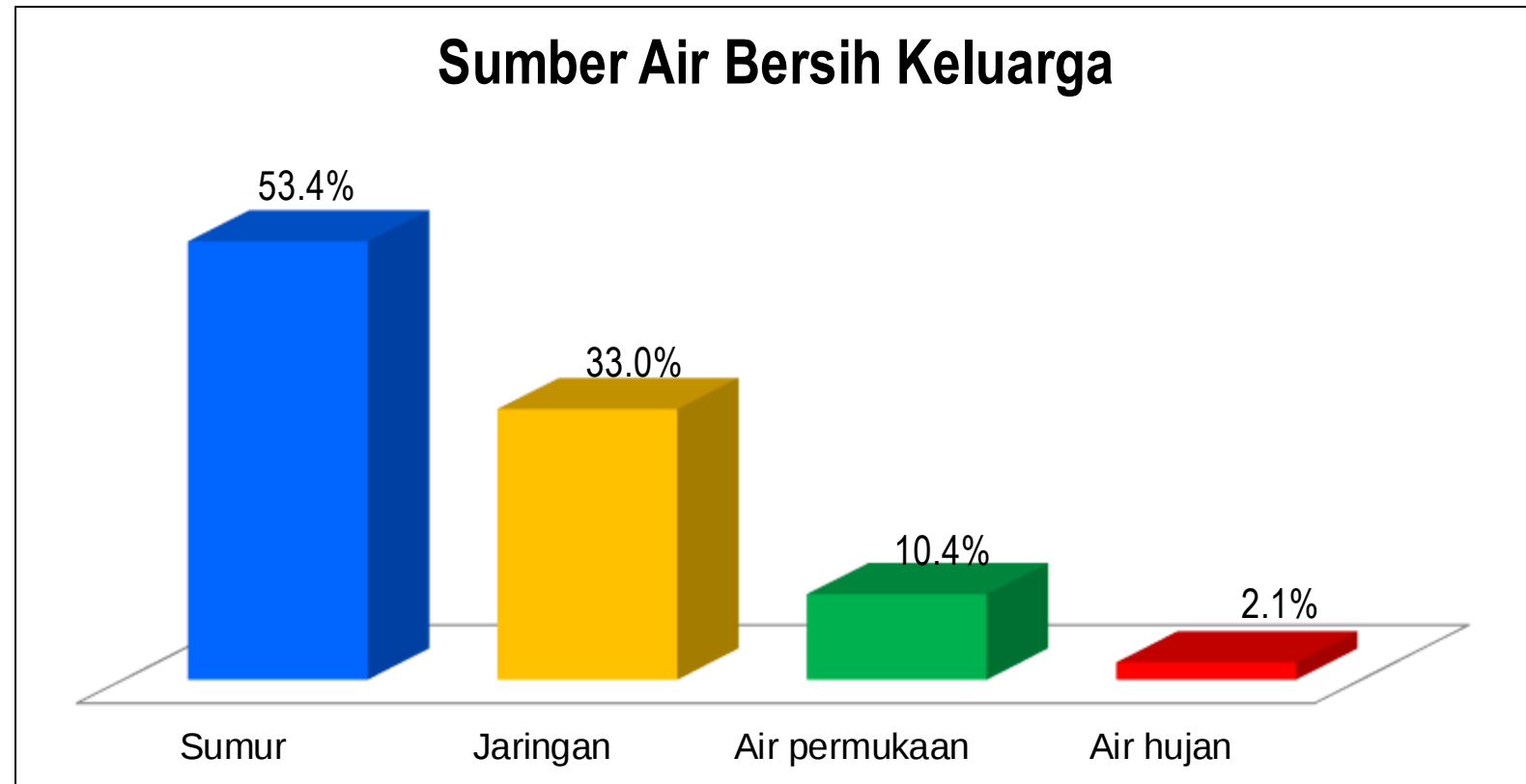


Berdasarkan hasil survey, terdapat $\pm 20\%$ penerima stimulan yang belum memiliki fasilitas kamar mandi dan jamban. Kondisi ini menggambarkan bahwa aspek sanitasi belum menjadi perhatian penerima dana stimulan.

ASPEK KESEHATAN PENGHUNI

Penerima dana stimulan memanfaatkan dana untuk meningkatkan aspek pencahayaan, penghawaan dan ketersediaan sistem air bersih dan sanitasi

Sumber: Hasil Pengolahan, 2018



Sumber air bersih penerima stimulan umumnya bersumber dari sumur, jaringan dan air permukaan

ASPEK KECUKUPAN LUAS MINIMUM BANGUNAN

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, luas minimal rumah sederhana (asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 orang) adalah 36 m² atau 9 m² per jiwa (Badan Standar Nasional Indonesia 2004).

Sumber: Hasil Pengolahan, 2018



Rata-rata luas bangunan rumah penerima dana stimulan setelah pembangunan adalah 49,7 m² dengan rata-rata penghuni adalah 4,4 orang per rumah sehingga luas minimal hunian adalah 11.18 m²/orang (memenuhi syarat)

CATATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BSPS TA 2019



CATATAN PENYELENGGARAAN BSPS TA 2019



Output Kegiatan :

Rumah Layak Huni

Berdasarkan PermenPUPR No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan :



KESELAMATAN BANGUNAN

- Kehandalan Komponen Struktur*
- Peningkatan Kualitas Bahan Komponen Non Struktur (Penutup Atap, Lantai dan Dinding)*



KECUKUPAN MINIMUM LUAS BANGUNAN

Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.



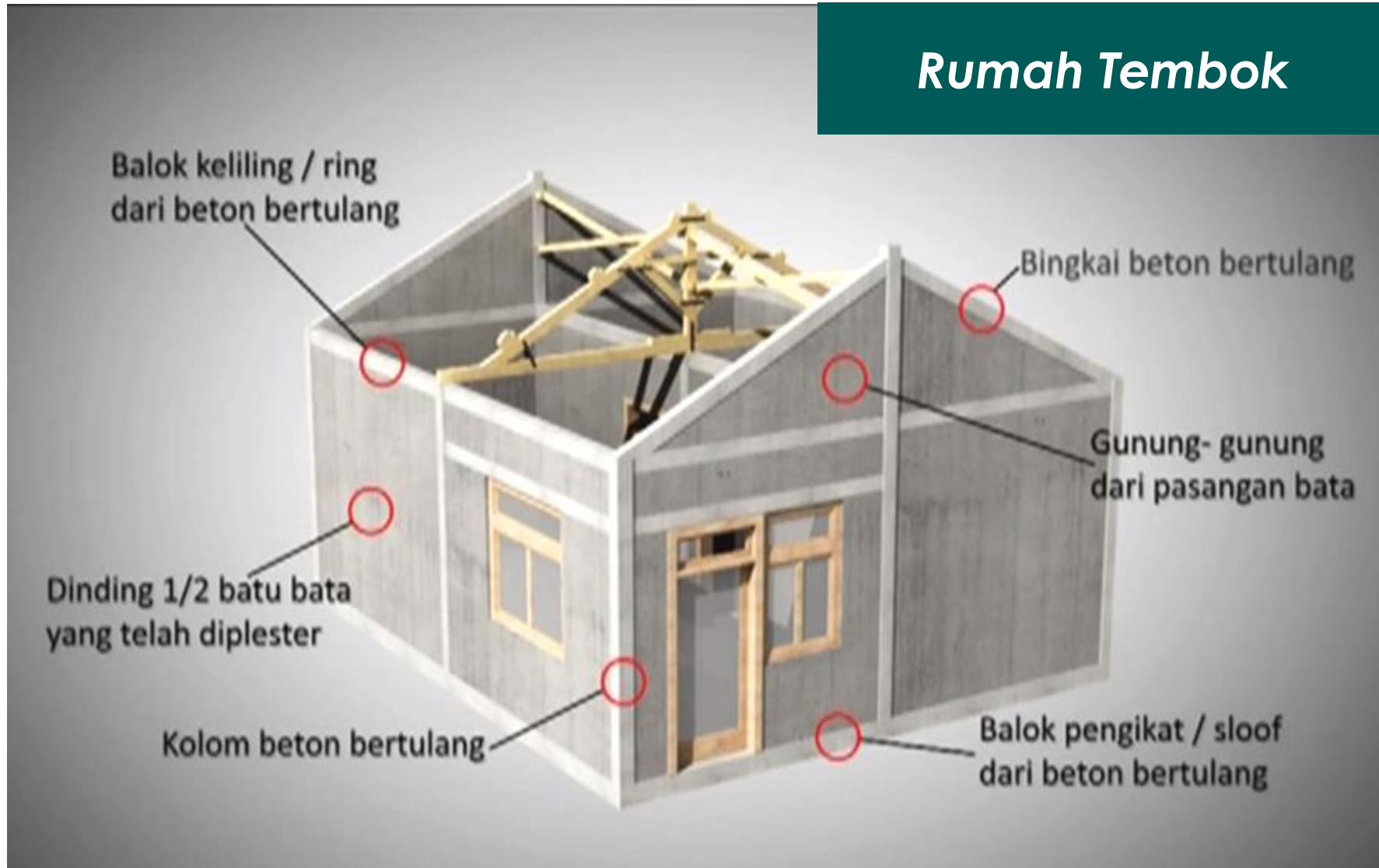
KESEHATAN PENGHUNI

- Pencahayaan*
- Penghawaan dan*
- Sanitasi (Kamar Mandi, Cuci, Kakus).*

KESELAMATAN BANGUNAN

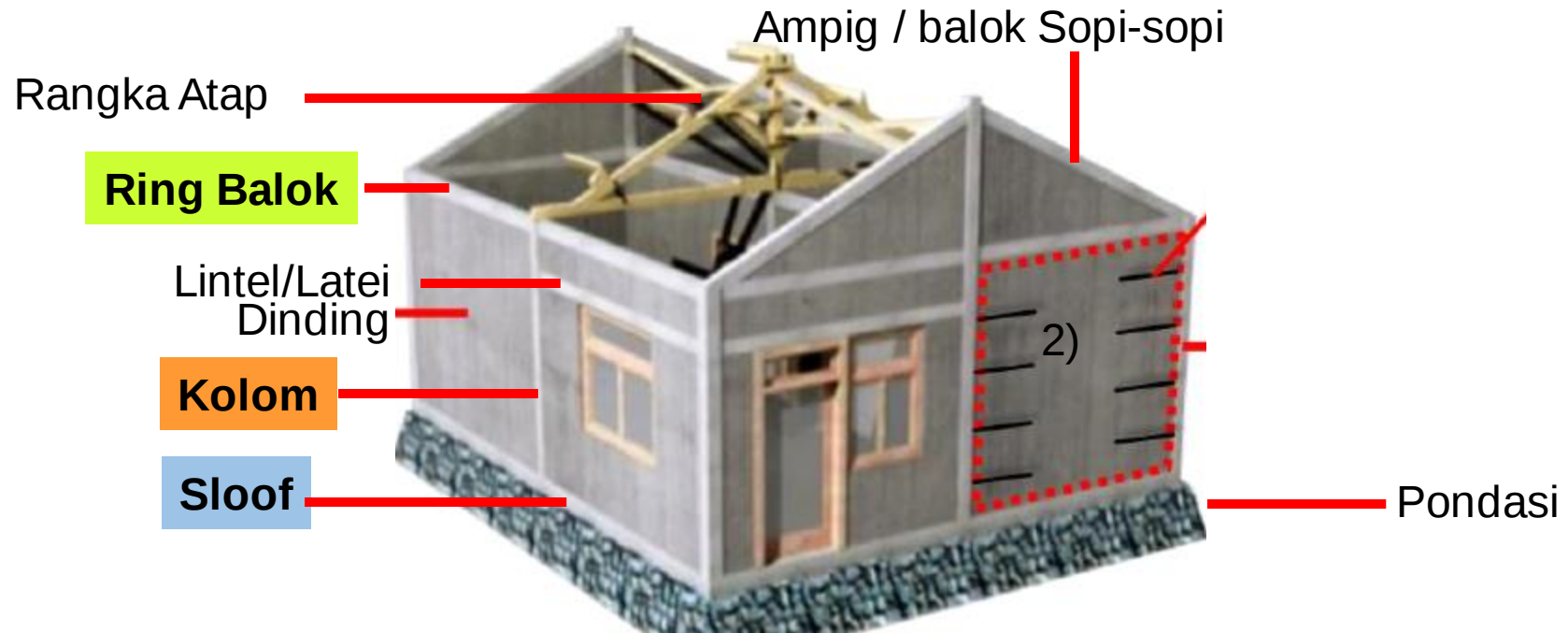
KOMPONEN STRUKTUR dan NON STRUKTUR

Rumah Tembok



RUMAH TEMBOK

KOMPONEN STRUKTUR



Ring Balok

sebagai pengikat kolom dan untuk menyalurkan beban dari atap ke kolom

Kolom/Tiang

sebagai penyangga dan untuk menyalurkan beban dari ring balok.

Sloof

Sloof (balok pondasi) sebagai ganti rollag untuk meratakan beban di atasnya dan menahan dinding agar tidak retak.

RUMAH KAYU PANGGUNG

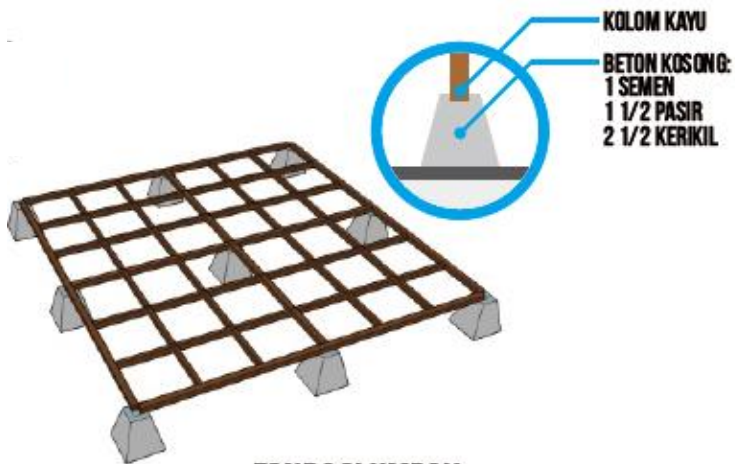
KOMPONEN STRUKTUR BAGIAN BAWAH



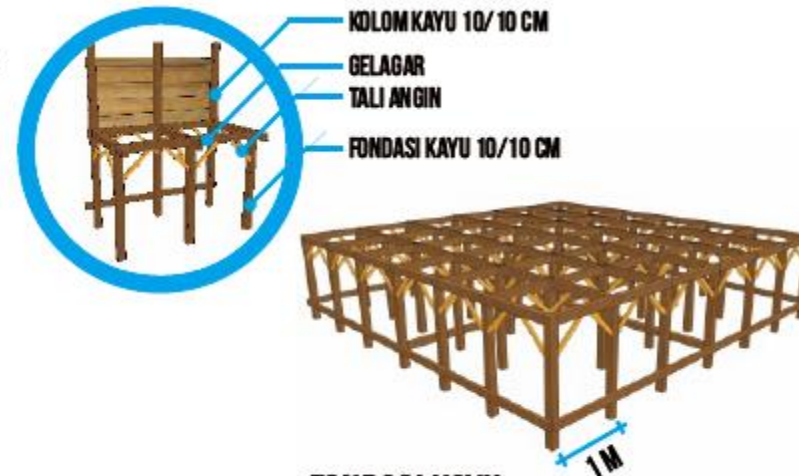
PANGGUNG UMPAK



**PANGGUNG
TIANG PANCANG**



FONDASI UMPAK



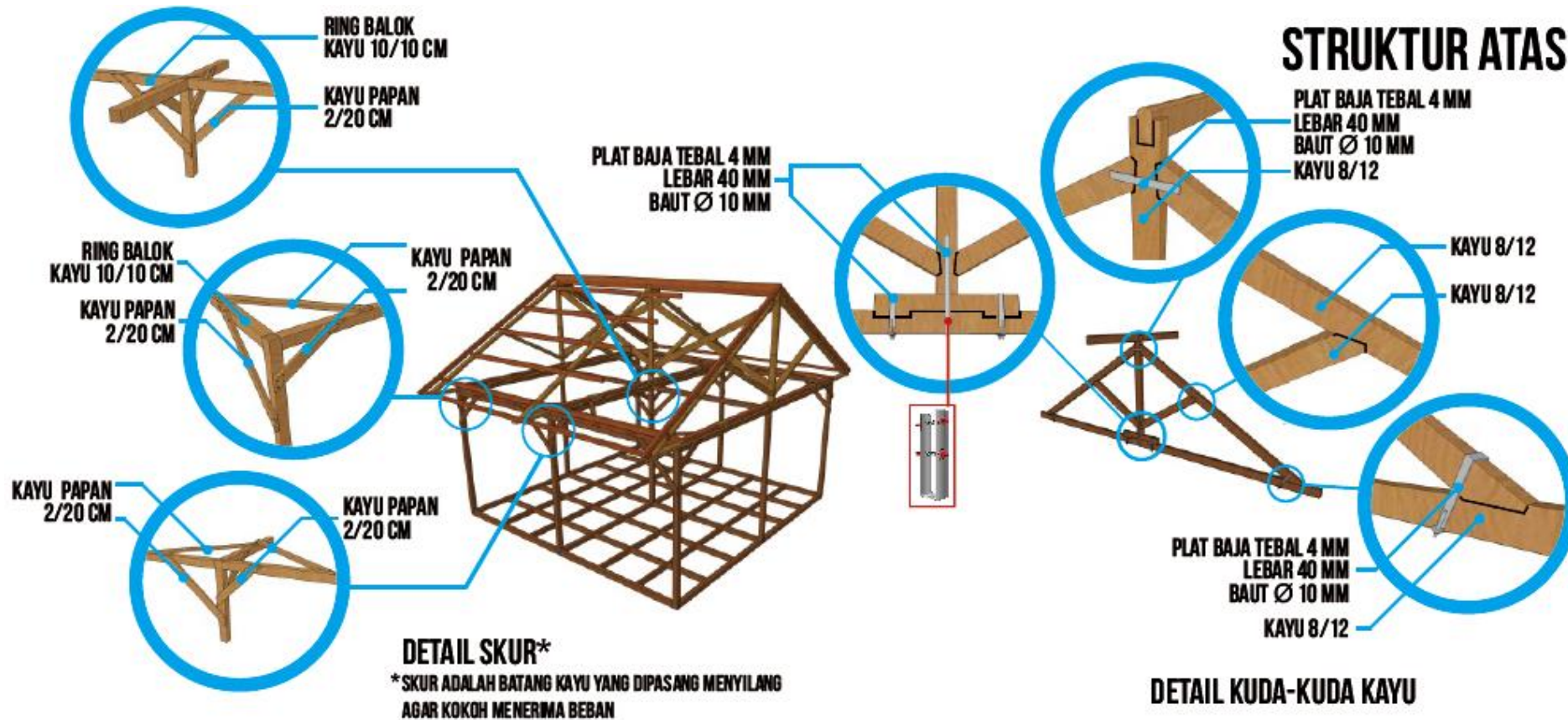
FONDASI KAYU

KOLOM KAYU
BETON KOSONG:
1 SEMEN
1 1/2 PASIR
2 1/2 KERIKIL

KOLOM KAYU 10/10 CM
GELAGAR
TALI ANGIN
FONDASI KAYU 10/10 CM

RUMAH KAYU PANGGUNG

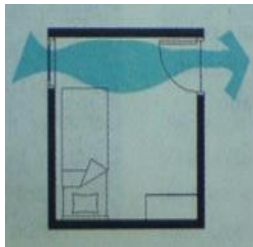
KOMPONEN STRUKTUR BAGIAN ATAS



KESEHATAN PENGHUNI

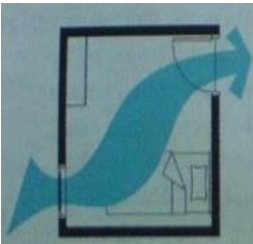
PENCAHAYAAN, PENGHAWAAN DAN SANITASI

- Terpenuhinya persyaratan penghawaan, yaitu: minimal 15% - 20% dari luas tapak/lahan atau 5% - 10% dari luas lantai ruangan (SNI).
- Terpenuhinya persyaratan pencahayaan, yaitu: cahaya alami minimal 15% - 20% dari luasan lantai didalam ruangan rumah, cahaya buatan minimal 50 – 300 lux/meter (SNI).
- Sanitasi (Kamar Mandi, WC atau Jamban Keluarga)
- Tersedianya sarana mandi, cuci, kakus (MCK)



Bukaan pada sisi berhadapan

Aliran angin tidak merata dan menciptakan zona panas di sebagian ruangan



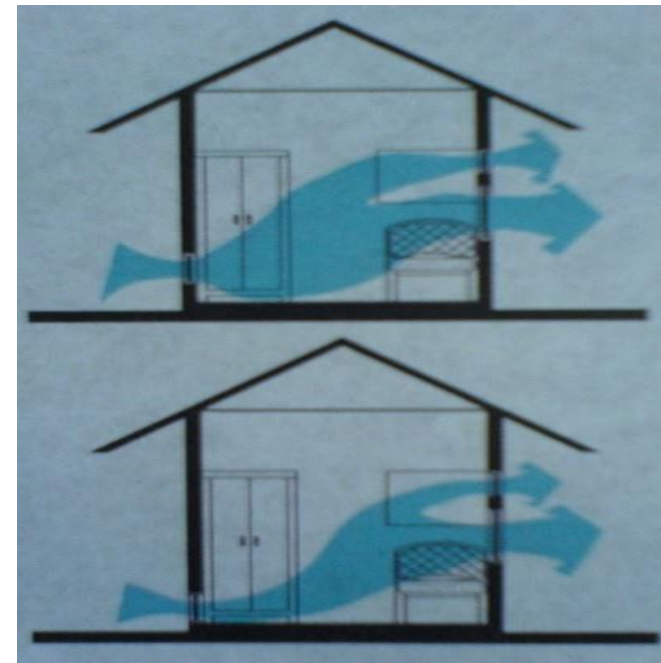
Penempatan Bukaan pada Sisi Berseberangan

Aliran angin dapat menjangkau seluruh ruang



Bukaan lebih banyak pada satu sisi dibanding sisi lainnya

Memungkinkan aliran udara yang lebih besar



Sumber:

SNI 03-2396 Pencahayaan Alami

SNI 03-6575 Pencahayaan Buatan

KESEHATAN PENGHUNI

STANDAR PENCAHAYAAN DAN PENGHAWAAN

Standar Pencahayaan sebesar 5% - 10% dari luas lantai.

Jika luas lantai $3 \times 3 \text{ m}^2$, maka luas lubang pencahayaan sebesar $0,1 \times 9 = 0,9 \text{ m}^2$

Lubang pencahayaan berasal dari kaca jendela :

- Untuk model jendela minimalis ukuran kaca $0,25 \text{ m} \times 1,2 \text{ m} = 0,3 \text{ m}^2$
- Untuk memenuhi standar, maka kamar menggunakan : $0,9 / 0,3 = 3$ buah jendela minimalis

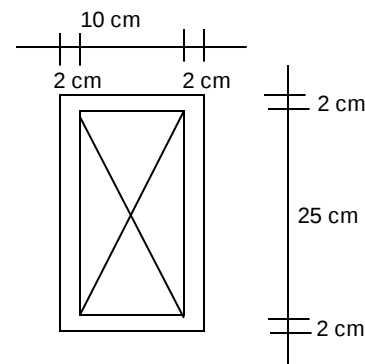
Standar Penghawaan sebesar 5% dari luas lantai.

Jika luas lantai $3 \times 3 \text{ m}^2$, maka luas lubang pencahayaan sebesar $0,05 \text{ m} \times 9 = 0,45 \text{ m}^2$

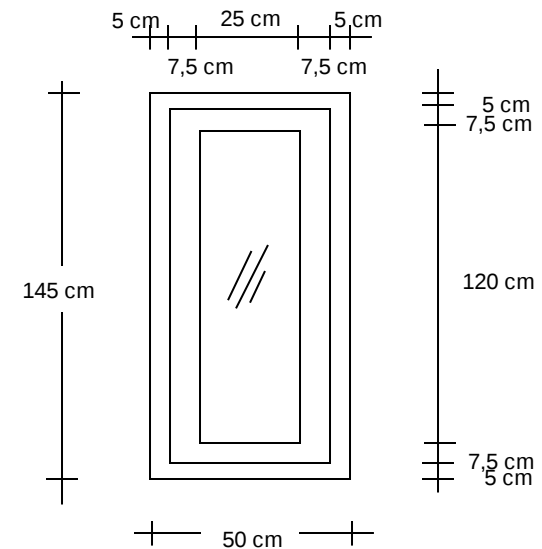
Lubang pencahayaan berasal dari lubang ventilasi:

- Untuk lubang ventilasi ukuran $0,25 \text{ m} \times 0,1 \text{ m} = 0,025 \text{ m}^2$
- Untuk memenuhi standar, maka kamar menggunakan : $0,45 / 0,025 = 18$ buah lubang ventilasi

Dari analisa di atas terasa bahwa jumlah jendela dan Ventilasi terlalu banyak. Untuk itu **perlu peninjauan standar yang digunakan**



Ventilasi



Jendela Minimalis

CATATAN PENYELENGGARAAN BSPS TA 2019



Penerima BSPS

1. **Penerima BSPS harus memenuhi persyaratan penerima bantuan sesuai dengan PermenPUPR No 07 Tahun 2018**
2. Perlunya perhatian khusus terhadap identifikasi keswadayaan penerima bantuan,
3. Terdapat penerima bantuan yang membangun rumah terlalu besar, namun tidak sesuai dengan jumlah dana stimulan dan swadaya yang dimiliki, sehingga membutuhkan periode waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pembangunan rumah,
4. Berkurangnya tradisi gotong royong antar masyarakat,
5. Terbatasnya ketersediaan tenaga tukang dan/atau masyarakat penerima program yang memiliki kemampuan tukang,

CATATAN PENYELENGGARAAN

BSPS TA 2019

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi, diidentifikasi beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1** Pengetahuan serta keterampilan TFL terkait mekanisme program rumah swadaya, penyusunan RAB, dan teknik konstruksi bangunan masih perlu ditingkatkan
- 2** Tenaga Fasilitator Lapangan belum memiliki pengalaman dalam bidang teknik pembangunan rumah dan/atau pemberdayaan masyarakat
- 3** Tenaga Fasilitator Lapangan bukan merupakan penduduk asli wilayah dampingan, sehingga terkendala dalam melakukan dampingan
- 4** Koordinasi antara TFL dengan pelaksana Program BSPS (Tim Teknis Kab/Kota dan bank/pos penyalur) perlu ditingkatkan

BAHAN BANGUNAN / TOKO BAHAN BANGUNAN

1. Harga bahan bangunan yang melebihi harga satuan kab/kota
2. Bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan tidak sesuai dengan nota pengiriman barang dari toko.

BANK/POS PENYALUR

1. Bank/pos penyalur tidak memiliki kantor cabang yang mendekati lokasi penerima BSPS dan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendatangi lokasi penerima,
2. Bank/pos penyalur belum memahami mekanisme pelaksanaan BSPS

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI (KMW)

1. Kesesuaian kualifikasi personil dalam TOR/KAK dengan kualifikasi personil yang direkrut.
2. Kelalaian dan melakukan pengendalian kontrak.
3. Kelengkapan bukti pengeluaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil.
4. Pembayaran item biaya langsung personil atau biaya langsung non personil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kewajiban pelaporan dari KI/KMPProv/KMW

PELAPORAN

1. Pelaksanaan BSPS dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana *master schedule* yang telah disusun
2. Kelengkapan dokumen administrasi misalnya dokumen proposal dan LPD (DRPB, nota pengiriman bahan bangunan)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

TERIMAKASIH